

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023	2
Tabel 2 Jumlah Perizinan Permohonan Masuk Pembuatan Perumahan Baru pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021	3
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	11
Table 4 Informan Wawancara	46
Table 5 Program Tindakan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang P2CKTR.....	65
Table 6 Indikator Rencana Kerja (Renja) Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.....	67
Table 7 Data Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.....	69

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Tiga Pilar Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan.....	35
Gambar 2 Kerangka Konseptual <i>Sumber : Analisis Peneliti</i>	41
Gambar 3 Spiral Analisis Menurut J. W. Cresswell.....	50
Gambar 4 Peta Kabupaten Sidoarjo <i>Sumber : RKPD Kabupaten Sidoarjo, 2024</i>	53
Gambar 5 Peta Persebaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.....	54
Gambar 6 Forum Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	59
Gambar 7 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Menurut Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	61
Gambar 8 Halaman Beranda Sistem Online Single Submission (OSS) RBA.....	62
Gambar 9 Persentase Persebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dan Riset Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur	93
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dan Riset Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo	94
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dan Riset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo	96
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dan Riset Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	97
Lampiran 5 Bukti Submit Artikel Ilmiah	98
Lampiran 6 <i>Letter of Acceptance (LoA)</i> Artikel Ilmiah	99
Lampiran 7 Draft Artikel Ilmiah Terpublikasi	101
Lampiran 8 Tanda Persetujuan Skripsi	118
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi	119
Lampiran 10 Pedoman Wawancara dan Transkrip Wawancara	121
Lampiran 11 Dokumentasi Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara	150
Lampiran 12 Wawancara Dengan Bapak Andrea Rama Wijaya Selaku Sekretaris RW 08	158
Lampiran 13 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	159
Lampiran 14 Pembangian Wilayah Kabupaten Sidoarjo Menurut SSWP	160
Lampiran 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029	163
Lampiran 16 Peta Kabupaten Sidoarjo	164
Lampiran 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039	165
Lampiran 18 Peta Persebaran Wilayah Perkotaan Di Sidoarjo	166
Lampiran 19 Peta Persebaran Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo	168
Lampiran 20 Analisis Rencana Kerja DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo	173
Lampiran 21 Lembar Revisi Dosen Penguji 1	175
Lampiran 22 Lembar Revisi Dosen Penguji 2	176
Lampiran 23 Lembar Revisi Dosen Penguji 3	177
Lampiran 24 Surat Keterangan Bebas Plagiasi Kampus	178
Lampiran 25 Hasil Cek Plagiasi Skripsi	179

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dan Riset Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA – (60189)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000.9/ 6122 /209/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya
Nomer : 1156/K/FISIP/IV/2024 Tanggal : 23 April 2024

Nama : **EVINDA FENNY WULANDARI**

Alamat : Jl. Diponegoro RT.06 RW.02 Kel. Jatirejo Kec. Porong Kabupaten Sidoarjo

Nomor Telepon : 0896504496097

Pekerjaan : Mahasiswa / Mahasiswi

Judul Penelitian : "Interactive Planning dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo"

Bidang Penelitian : Mencari Data, Wawancara, Skripsi / Administrasi Publik

Lokasi Penelitian : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo
2. Dinas Perumahan, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo

Waktu Penelitian : April – Mei 2024


Status Penelitian : Baru

Anggota Tim Penelitian : -


Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 24 April 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris


NURUL ANSORI, S.Pd, M.Kes
Peneliti (IV/a)
NIP.197002042000121006

Tembusan :
Yth. Bupati Sidoarjo
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dan Riset Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 29 April 2024
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo,
di
S I D O A R J O

Nomor : 000.9/942/438.6.5/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. EVINDA
FENNY WULANDARI

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor : 000.9/6122/209/2024 tanggal 24 April 2024 Perihal **Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OJT**, maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : EVINDA FENNY WULANDARI
Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 14 Oktober 2001
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Diponegoro RT. 006 RW. 002 Jatirejo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo
Instansi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA / FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
NIM : 1112000069
Judul : **INTERACTIVE PLANNING DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PEMUKIMAN
UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
SIDOARJO**

Pembimbing /
Penanggungjawab : Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP
Peserta : -
Bidang : Pembangunan
Tujuan : Permintaan Data, Wawancara, Penelitian
Waktu : 01 April 2024 s/d 31 Mei 2024
Telephone/Hp : 0895604496097 Email : evndfny12@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan. Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**

Ditandatangani secara elektronik oleh

 FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM
NIP. 197002021991011002

FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 197002021991011002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran Surat
Nomor : 000.9/942/438.6.5/2024
Tanggal : 29 April 2024

Tempat Pelaksanaan Penelitian

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo;
2. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sidoarjo.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM
NIP. 197002021991011002

FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 197002021991011002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dan Riset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 23 April 2024

Nomor : 1157/K/FISIP/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Jl. Sultan Agung No. 13, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

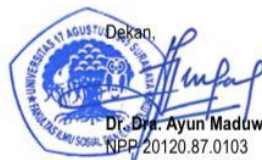
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Evinda Fenny Wulandari (1112000069)	Perumas II Blok R7 No 3 RT 08/RW 08 Tanggulangin-Sidoarjo	0895604496097

Guna melakukan pengambilan data di:

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo"

Dengan Judul Skripsi: **"Interactive Planning dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Dekan,
Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
NIP. 20120.87.0103

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dan Riset Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fispj@untag-sby.ac.id

Surabaya, 23 April 2024

Nomor : 1158/K/FISIP/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya,
dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Jl. Ahmad Yani, Pucang, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Evinda Fenny Wulandari (1112000069)	Perumtas II Blok R7 No 3 RT 08/RW 08 Tanggulangin-Sidoarjo	0895604496097

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo"


Dengan Judul Skripsi: **"Interactive Planning dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Dra. Ayem Maduwiharti, M.P.
NPP 20120.87.0103

Lampiran 5 Bukti Submit Artikel Ilmiah



BIROKRASI
JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA

HOME / ARCHIVES /
VOL. 2 NO. 3 (2024): SEPTEMBER : JURNAL ILMU HUKUM
DAN TATA NEGARA
/

##section.default.title##

Perencanaan Interaktif sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo

Evinda Fenny Wulandari
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1314>

Link Artikel Ilmiah: <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1314>

Lampiran 6 *Letter of Acceptance (LoA)* Artikel Ilmiah



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA YAPPI MAKASSAR

Status Terakreditasi B: Keputusan BAN-PT. Nomor : 3842/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Sekretariat : Jl. Sumba No. 46 / Jl. Abd. Kadir No. 29
Telp. (0411) 3616142 No. Fax. (0411) 3623310 Makassar 90174
Website/Email : www.stiyappimakassar.ac.id / stiyappimks@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER

No. 1314/BIROKRASI/STIAYAPPI/F/2024

Kepada Yth,
Bapak / Ibu / Saudara / i : **Evinda Fenny Wulandari, Anggraeny Puspaningtyas,
Adi Soesiantoro**

di -
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

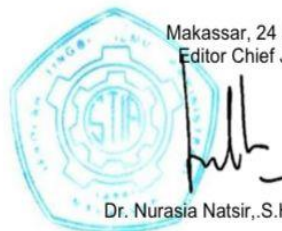
Dengan hormat,
Kami dari Redaksi **Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara (BIROKRASI)**, dengan nomor e-ISSN: 2987-8632; .p-ISSN: 2987-8624 menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul:

"Perencanaan Interaktif sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo"

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan diterbitkan di **Volume 2 Nomor 3 Edisi September 2024**.

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik saudara selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Makassar, 24 Juni 2024
Editor Chief Journal :

Dr. Nurasia Natsir, .S.Hum.,.M.Hum



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA YAPPI MAKASSAR

Status Terakreditasi B: Keputusan BAN-PT. Nomor : 3842/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Sekretariat : Jl. Sumba No. 46 / Jl. Abd. Kadir No. 29
Telp. (0411) 3616142 No. Fax. (0411) 3623310 Makassar 90174
Website/Email : www.stiyappimakassar.ac.id / stiyappimks@yahoo.com

LEMBAR EVALUASI PAPER

Penulis : Evinda Fenny Wulandari, Anggraeny Puspaningtyas, Adi Soesiantoro
Kode Artikel : BIROKRASI_1314
Judul : "Perencanaan Interaktif sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo"

A. OBJEK EVALUASI

No.	Deskripsi	Komentar
1.	Keterwakilan isi artikel dalam Judul	Isi sudah relevan dengan judul.
2.	Cerminan isi artikel dalam Abstrak	Baik, Masalah, metode dan hasil terwakili,
3.	Ruang Lingkup Penelitian dalam Kata kunci	Baik
4.	Kejelasan Metodologi Penelitian	Baik
5.	Penyajian dan interpretasi Data	Baik
6.	Penggunaan Tabel dan Gambar	Baik
7.	Relevansi Diskusi/Analisis dengan Hasil Penelitian	Baik
8.	Relevansi Acuan/Referensi	Baik
9.	Kontribusi terhadap Ilmu pengetahuan	Baik
10.	Sistematika Penulisan	Baik
11.	Penggunaan Bahasa	Baik

B. KEPUTUSAN REVIEWER

1. Artikel dapat diterbitkan secara langsung {...}
2. Artikel dapat diterbitkan dengan sedikit revisi {√}
3. Artikel dapat diterbitkan dengan banyak revisi {...}
4. Artikel silakan kembali ke kami untuk re-evaluasi setelah revisi {...}
5. Artikel tidak layak untuk diterbitkan berdasarkan alasan di atas {...}



Perencanaan Interaktif sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo

Evinda Fenny Wulandari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: evndfny12@gmail.com

Abstract: Population growth in Sidoarjo Regency has increased quite high every year. This then causes an increase in the need for land as residential land to meet the population's housing needs. To overcome this problem, efforts are needed from the Sidoarjo Regency Government through development planning and development of residential areas. This research discusses the application of Interactive Planning in development planning and development of residential areas in Sidoarjo Regency as well as coordination between relevant stakeholders in developing residential areas in Sidoarjo Regency. The aim of this research is to determine the application of interactive planning in development planning in Sidoarjo Regency as well as the coordination carried out between stakeholders in implementing the development of residential areas in Sidoarjo Regency. The theory used in this research is the Interactive Planning theory put forward by Ackoff Russel. The Method used is a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this research are that the application of interactive planning in development planning and development residential areas in Sidoarjo Regency is already underway but hasn't been implemented optimally. This is based on the success factors of interactive planning which include participative principal, continuity principal, and holistic principal which are still not optimally fulfilled. Apart from that, coordination between stakeholders in the implementation of residential area development is still not optimal.

Keywords: Interactive Planning, Sustainable Development, Development of Residential areas

Abstrak: Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan sebagai lahan hunian untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduk. Untuk mengatasi masalah ini sangat diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *Interactive Planning* dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo serta koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* terkait dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan interaktif dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo serta koordinasi yang dilakukan antara stakeholder dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori *Interactive Planning* yang dikemukakan oleh Ackoff Russel. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *interactive planning* dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan namun belum optimal dilaksanakan, hal tersebut didasari oleh faktor keberhasilan perencanaan interaktif yang meliputi prinsip partisipatif, prinsip berkelanjutan, dan prinsip holistik masih belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman masih belum maksimal dilakukan.

Kata Kunci: Perencanaan Interaktif, Pembangunan Berkelanjutan, Pengembangan Wilayah Permukiman

Received Mei 29, 2024; Accepted Juni 22, 2024; Published September 30, 2024

* Evinda Fenny Wulandari, evndfny12@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di kawasan Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 714,2km persegi dimana kawasannya terbagi atas 18 Kecamatan, 31 Kelurahan/desa, dan kurang lebih sekitar 322 dusun. Sidoarjo juga merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,7 juta jiwa pada akhir tahun 2023 sesuai dengan hasil sensus data penduduk Kabupaten Sidoarjo. Persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya diketahui memiliki peningkatan yang cukup signifikan, dari hasil data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat mencapai angka 1,5-2,1 persen.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Jiwa	2.266.533	2.033.764	2.238.069	2.266.533	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2019-2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Tingginya persentase peningkatan jumlah penduduk ini kemudian menyebabkan beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, tingginya angka kriminalitas, dan terutama pada tingginya kebutuhan lahan untuk kepentingan tempat tinggal atau lahan hunian. Adanya masalah yang timbul di Kabupaten Sidoarjo terutama pada tingginya angka kebutuhan lahan untuk tempat tinggal ini kemudian mengakibatkan banyaknya terjadi kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini dijelaskan dalam “Sidoarjo Dalam Angka 2022” yang merupakan suatu laporan rekapitulasi statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo yang menyebutkan bahwa, berkurangnya luasan lahan pertanian aktif di Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah karena banyaknya kegiatan alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan permukiman dan perumahan untuk tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Kawasan permukiman merupakan suatu bagian dari lingkungan yang berupa ruang baik dalam wilayah perkotaan atau pedesaan dengan fungsi utama sebagai lahan tempat tinggal bagi masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Adanya fenomena peningkatan kebutuhan lahan yang signifikan ini kemudian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bahwa Bupati Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”, dimana maksud dari visi dan misi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. .

Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo dijelaskan beberapa hal terkait dengan strategi umum untuk mewujudkan visi dan misi diantaranya: 1). Penguatan Tata kelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik, 2). Penguatan Ekonomi Sektor Strategis Simultan dengan Percepatan Ekonomi Kerakyatan, 3). Pemenuhan Infrastruktur Tata Kota Terintegritas dengan Pengembangan Wilayah dan Sistem Transportasi Terpadu, 4). Pembangunan yang Berpusat pada Manusia (*Human Centered Development*), 5). Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan dari strategi yang telah dijelaskan dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menguatkan strategi perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman melalui salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang membahas terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, menjelaskan tentang rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo selama 20 tahun kedepan. Dalam Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 5 bagian yang kemudian disebut dengan SSWP. Pembagian wilayah di Kabupaten Sidoarjo ini di maksudkan untuk meratakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Pembagian wilayah di Kabupaten Sidoarjo terbagi atas SSWP 1 hingga SSWP 5 dimana di dalamnya terdapat semua sektor yang diperlukan dalam pembangunan yang meliputi Industri, pertanian, konservas, pariwisata, dan permukiman rakyat. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar dalam suatu penyusunan perencanaan pembangunan daerah, RPJMD merupakan salah satu bagian yang berperan penting dan berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan nasional terutama sebagai pendukung dan penunjang koordinasi antara para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pembangunan.

Dalam pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, tentu nya pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah di sepakati dibawah pengawasan instansi terkait yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kemudian pelaksanaan perancangannya akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo yang kemudian secara detail akan ditindak lanjuti oleh Dinas

yang bersangkutan yakni Dinas Perumahan, Permukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo melalui Rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan, kemudian dalam pelaksanaannya akan melibatkan instansi dan juga stakeholder lainnya. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam urusan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo ini kemudian menyebabkan beberapa urgensi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam masalah pengembangan wilayah permukiman yang terkait dengan proses perencanaan hingga pelaksanaan, para aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan (Stakeholders) yang terlibat memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam proses perencanaan tersebut. Perencanaan pembangunan yang dirancangan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana rencana tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya dikarenakan proses penyusunan rencana strategis dilakukan secara individu oleh para pemangku kepentingan dan instansi itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk terjadi adanya kurang koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo masih belum banyak diketahui secara umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait dengan penerapan perencanaan interaktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan wilayah permukiman. Adapun tahapan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori interaktif planning menurut pendapat dari Ackoff Russel dimana dalam perencanaan interaktif terdapat tiga prinsip yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: 1). Participatif Principal, 2). Continuity Principal, dan 3). Holistik Principal (Puspaningtyas, 1945). Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk dapat menganalisis koordinasi antara instansi terkait yang dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan juga Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo

KAJIAN TEORITIS

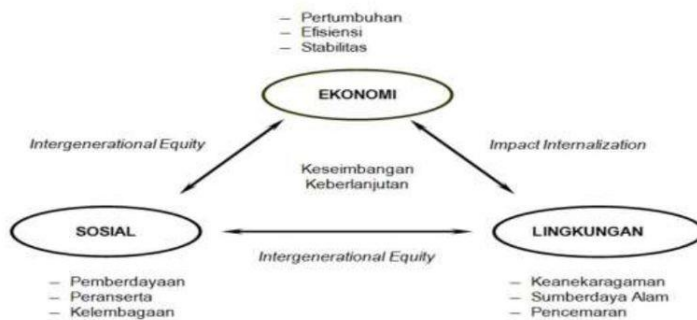
Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan secara garis besar diartikan sebagai kegiatan administrasi dalam kegiatan pembangunan suatu negara. Menurut pendapat dari Sondang P. Siagian (1983), Administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara

dalam berbagai aspek kehidupan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (Setiawan & Pembangunan, 2019). Administrasi pembangunan dalam pelaksanaannya memuat fungsi dan pendekatan manajemen sebagai penunjang dari rangkaian perencanaan yang telah dibuat oleh para administrator. Pendekatan manajemen (*tools of management*) dalam pelaksanaan administrasi pembangunan biasanya disebut dengan 5M yang meliputi Men (Manusia), Money (Uang), Materials (Bahan Baku), Methode (Metode/Tatacara), Machine (Mesin). Pendekatan manajemen pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Perencanaan Pembangunan yang meliputi tujuan, sasaran, jangka waktu, isu/masalah yang sedang dihadapi, modal/sumberdaya, kebijakan pelaksanaan, manusia, organisasi/badan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, 2). Pengerahan Sumber Daya, 3). Kebijakan Pembangunan yang mendukung tujuan, 4). Manajemen Sumber Daya Manusia, 5). Kerjasama Internasional.

Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam suatu negara. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tiga aspek pembangunan berkelanjutan yang dimaksud ialah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengembangan 3 pilar dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini memberikan pengertian bahwa pembangunan berkelanjutan harus dapat mencapai kesetaraan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan yang berkaitan antara satu sama lainnya.



Gambar 1 Tiga Pilar Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan
 Sumber : *retmoeka-wordpress, 2015*

Interactive Planning

Perencanaan Interaktif atau yang biasa disebut sebagai *interactive planning* merupakan suatu rangkaian proses yang digunakan untuk menentukan apa yang diinginkan dalam sebuah organisasi pada kondisi saat ini yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesenjangan yang sedang dihadapi dengan upaya penyelesaian yang akan dilaksanakan dimasa depan. Perencanaan interaktif dalam suatu perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk merumuskan encana terkait pembangunan dalam suatu negara yang berdasarkan pada suatu sistem. Menurut pendapat dari Ackoff Russel (1981), menyebutkan bahwa “Interactive planning focuses on making the future, believing that an organization's present depends on as much on what it does now as on what it does to” (Puspaningtyas, 1945). Dalam pendapatnya, Ackoff juga menyebutkan bahwa tujuan suatu perencanaan interaktif adalah upaya efektif untuk mencapai keadaan yang diidealkan. Dalam pelaksanaannya, *interactive planning* harus memenuhi beberapa prinsip dalam prosesnya yang meliputi : partisipasi masyarakat, kesinambungan dari setiap prosesnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, holistik dalam artian menyeluruh dan utuh, memiliki sistem pembelajaran dan adaptif, serta bersifat demokratis dan terbuka (Penguatan et al., 2020). Metode perencanaan interaktif atau *interactive planning* yang dikemukakan oleh Ackoff Russel menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang mendukung suatu proses perencanaan: 1). *Participative Principle*, 2). *Continuity Principle*, 3). *Holistic Principle*. Teori Interactive Planning dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo yang berdasar pada perencanaan pembangunan dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian pada penerapan perencanaan interaktif dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori Interactive Planning menurut Ackoff Russel yang memiliki tiga prinsip yaitu prinsip partisipatif, prinsip berkelanjutan, dan prinsip holistik. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder, dimana data primer di dapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung pada narasumber terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman dan data sekunder diperoleh melalui analisis dari dokumen-dokumen pendukung penelitian seperti dokumen Peraturan Daerah, buku, e-jurnal, dan yang lainnya. Teknik mengumpulkan data pada penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan metode analisi data spirall analisis menurut J. W. Cresswell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

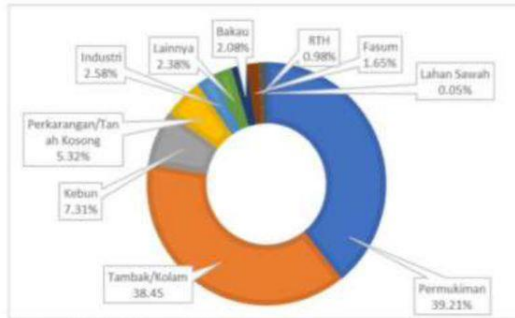
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 prinsip *interactive planning* yang digunakan untuk mengukur penerapan perencanaan interaktif dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Adapun ulasan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

Interactive Planning dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

1. Participative Principal

Participative principal atau prinsip partisipatif merujuk pada bentuk partisipasi yang terjadi dalam proses penyusunan dan perencanaan pengembangan wilayah permukiman dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipatif melibatkan bentuk partisipasi antara pihak-pihak terkait dengan stakeholder lain dan juga masyarakat. Adanya keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti para pemangku kepentingan, swasta, pihak penyelenggara, pihak penyedia, dan juga masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menjelaskan terkait dengan sejauh mana perencanaan pembangunan mengenai pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sebagai topik yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

Kabupaten Sidoarjo adalah satu diantara wilayah salah yang berada di Provinsi Jawa timur dengan luas wilayah sebesar 714,2km yang terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan, 31 wilayah kelurahan, dan 322 wilayah dusun dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa pada tahun 2023. Persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya diketahui memiliki peningkatan yang cukup signifikan, dari hasil data BPS Kabupaten Sidoarjo peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat mencapai angka 1,5-2,1 persen.



Gambar 2 Persentase Luasan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidoarjo
Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023, terdapat beberapa program yang dicanangkan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang P2CKTR. Dimana untuk mencaapai tujuan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah tersebut terdapat beberapa tindakan yang telah dijelaskan,

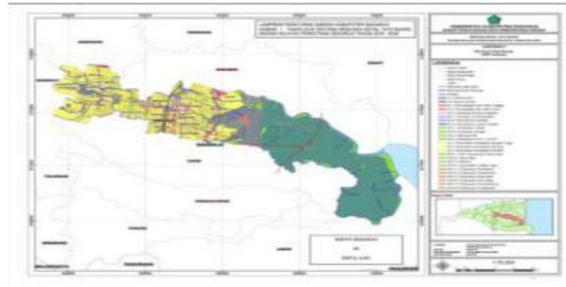
Table 2 Program Tindakan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang P2CKTR

Program Utama (Teknis)		Program Pendukung (Generik)	
No	Program	No	Program
1	Program Manajemen dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program untuk Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah		
3	Program untuk Meningkatkan Permukiman		
4	Program Pengembangan Perumahan		
5	Program Wilayah Permukiman		
6	Program Penataan Konstruksi Gedung		
7	Program Penataan Bangunan dan Pengaruhnya pada Lingkungan		
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
10	Program Ganti Kerugian dan Pemberian Tanah untuk Pembangunan		

Sumber : Renja DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2023

Pada uraian tabel Rencana Kerja (Renja) diatas, pengembangan wilayah permukiman merupakan salah satu program utama yang dirancang oleh DP2CKTR dimana diatur melalui tiga program utama yang meliputi :

1. Program Pengembangan Permukiman
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman



Gambar 3 Peta Persebaran Wilayah Permukiman dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo
 Sumber : Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Program-program yang telah disebutkan dan dicanangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo ini kemudian lebih dikerucutkan lagi menjadi program yang lebih kecil untuk dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dalam proses mencapai sasaran tersebut, DP2CKTR kemudian memiliki indikator keberhasilan pada masing-masing program yang dijelaskan lebih rinci dalam dokumen Renja lengkap dengan persentase, anggaran, faktor penghambat dan kegiatan tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat program. Penjelasan singkat program sebagai berikut :

Table 3 Indikator Rencana Kerja (Renja) Pengembangan Permukiman pada DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program
1	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur kawasan permukiman yang tersedia
2	Program Pengembangan Perumahan	Rumah susun yang tersedia dan rumah korban pasca bencana
3	Program Kawasan Permukiman	Penyelesaian luasan kawasan permukiman kumuh
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Area di luar permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang dilindungi dan pertumbuhan dan perkembangan

Sumber : Renja Perubahan DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2023

Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda dan DP2CKTR sama sama memiliki program berkelanjutan dimana program tersebut dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Prgram-program pegembangan wilayah permukiman yang dimaksudkan adalah terkait dengan perumahan, rumah susun, permukiman dan perkampungan, dan yang lain sebagainya.

2. Continuity Principal

Continuity Prinsipal atau prinsip berkesinambungan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai dan melihat sejauh mana perencanaan pembangunan dan pengambanan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dan juga sejauh mana konsep berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan. Konsep

berkelanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan dari konsep dan rencana pembangunan dari periode sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya memiliki kesinambungan antara satu sama lain atau tidak. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan terkait dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Bappeda dan juga DP2CTR Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat mencapai tujuannya yakni Sidoarjo berkelanjutan yang berarti membangun Kabupaten Sidoarjo yang berkelanjutan, *continuity principal* atau konsep berkesinambungan merujuk pada sejauh mana Pemerintah Daerah mengadakan program berkelanjutan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman yang sudah dirancang sesuai dengan RPJMD dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah. Seperti tujuan awal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dituangkan melalui visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo dalam RPJMD untuk mewujudkan Sidoarjo yang berkelanjutan adalah dengan dilakukannya program-program terkait dengan pembangunan.

Salah satunya adalah program terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah permukiman dan perumahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan lahan hunian dan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Holistik Principal

Dalam suatu perencanaan interaktif atau *interactive planning* dalam sebuah penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah, prinsip holistik memiliki arti penilaian seberapa holistik atau menyeluruh suatu perencanaan pengembangan wilayah permukiman telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Prinsip holistik dalam penelitian ini menilai sejauh mana perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo telah memikirkan segala aspek pembangunan berkelanjutan yang meliputi faktor lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Prinsip holistik dalam hal ini juga menilai sejauh mana para pemangku kepentingan berkoordinasi dan berintegrasi dalam proses perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo.

Pembahasan

Fenomena pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan beberapa masalah yang harus di atasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari adanya

fenomena ini adalah meningkatnya angka kebutuhan lahan hunian. Maka dari itu, peneliti dalam hal ini menganalisis fenomena tersebut melalui penelitian dengan judul “*Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Permukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *interactive planning* dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo dan koordinasi yang dilakukan antar OPD dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, DP2CKTR, DPMPSTP Kabupaten Sidoarjo, bahwasannya dalam perencanaan pembangunan terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan *interactive planning* atau perencanaan *Interactive*. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada OPD terkait.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Interactive Planning* pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan adanya koordinasi yang baik antar stakeholder yang bersangkutan. Hasil yang didapatkan oleh peneliti dari observasi lapangan dan juga wawancara yang dilakukan pada tempat penelitian, koordinasi yang dilakukan antar OPD terkait dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam koordinasinya. Masalah yang dimaksud adalah masalah komunikasi yang terjadi pada salah satu OPD. .

***Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.**

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan ulang hasil dari penelitian yang dilaksanakan berdasarkan pada data hasil pengamatan di lapangan dan wawancara yang sudah di deskripsikan diatas. Peneliti melakukan analisis perencanaan pembangunan pada pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo menggunakan *Interactive Planning* yang dalam hal ini adalah satu diantara metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan pada suatu daerah. Peneliti menggunakan teori *Interactive Planning* yang dikemukakan oleh Ackoff Russel, dimana terdapat 3 konsep prinsip yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pembangunan.

1. *Participative Principal*

Participatif principal atau prinsip partisipasi merupakan suatu keterlibatan dari pihak luar dalam suatu perencanaan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam teori *interactive planning* yang di kemukakan oleh Ackoff Russel dalam artikel “In interactive planning, the professional planner’s role is not to plan for others, but to encourage and facilitate their own planning. The act of planning is what matters. It provides for the participation of persons directly affected by the plan, thus motivating them to effectively carry out the plan.” (Santoso, 2015) dimana yang dimaksud adalah dalam suatu perencanaan interaktif, pihak perencana memiliki peran untuk mendorong dan memberikan fasilitas bagi perencanaan yang dibuat sendiri bukan untuk melakukan perencanaan bagi pihak lain. Dengan kata lain, pihak perencana harus melibatkan pihak-pihak yang merasakan dampak terkait dalam suatu perencanaan yang telah dibuat agar perencanaan tersebut berjalan lebih efektif. Partisipasi sangat diperlukan dalam suatu perencanaan interaktif, hal ini di karenakan pemerintah membutuhkan banyak sekali masukan dari pihak lain dalam merencanakan suatu pembangunan jangka panjang yang dimana perencanaan tersebut akan melibatkan banyak pihak. Dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, secara umum prinsip partisipatif ini sudah terpenuhi dilihat dari aspek-aspek pada prinsip ini yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan wilayah permukiman mulai dari 1). *Motivation*, 2). *information*, 3). *Knowledge*, 4). *Understanding*, 5). *Wisdom*, dan 6). *Effective thinking* yang dibutuhkan. hanya saja, aspek-aspek pada prinsip ini masih belum optimal dilakukan karena masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu untuk ditingkatkan seperti perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari OPD terkait dengan tupoksi masing-masing dalam pengembangan wilayah permukiman sehingga tidak terjadi saling lempar informasi.

2. *Continuity Principal*

Prinsip berkelanjutan merupakan salah satu prinsip yang harus terpenuhi dalam suatu perencanaan interaktif. Menurut pendapat Russel dalam artikel Michael L, menjelaskan bahwa “Suatu organisasi memiliki perubahan yang terus menerus terjadi seiring dengan berjalannya waktu (Santoso, 2015).

Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak perencana secara universal memberikan kewenangan kepada OPD yang lebih berwenang dalam mengurus urusan permukiman. Program tersebut disusun sesuai dengan dokumen Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan juga Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Program yang dicanangkan merupakan program jangka menengah yang setiap tahun akan dilakukan evaluasi program berkelanjutan. *Continuity Principal* dalam perencanaan interaktif memiliki 3 aspek yang harus diperhatikan:

a. *Monitoring/Pemantauan*

Dalam suatu perencanaan pembangunan, monitoring atau pemantauan selalu dilakukan untuk memastikan apakah program, kegiatan, atau urusan yang telah direncanakan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Dalam perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring secara global. Monitoring oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan secara sub-sektor. Sedangkan, pada DP2CKTR Kegiatan pemantauan program dilakukan secara berkala setiap triwulan yang kemudian akan dipaparkan dalam laporan evaluasi.

b. *Evaluation/Evaluasi*

Evaluasi pada program yang dilaksanakan dalam pengembangan wilayah permukiman di lakukan secara berkala setiap triwulan. Persentase indikator keberhasilan program yang direncanakan dalam pengembangan wilayah permukiman apabila tidak memenuhi persentase yang ditargetkan kemudian akan di tindak lanjuti pada triwulan selanjutnya. Namun, model evaluasi program yang dimaksud tidak dijelaskan dengan rinci oleh OPD terkait. Bentuk evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen rencana kerja hanya dijelaskan terkait dengan pencapaian saat ini dan juga hasil yang harus dicapai di triwulan selanjutnya. Sejauh ini hasil dari evaluasi program pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo terdapat pada persiapan dokumen perencanaan.

c. *Modification/Modifikasi Pemikiran*

Modifikasi model pemikiran dalam prinsip *continuity* atau berkelanjutan sangat diperlukan karena modifikasi dapat mendorong terciptanya pemikiran baru untuk dapat mengoptimalkan rencana yang telah disusun. Dalam pengembangan wilayah permukiman, modifikasi pemikiran atau program yang telah direncanakan perlu di lakukan. Pada program yang telah direncanakan oleh DP2CKTR sebagai rencana pengembangan wilayah permukiman tidak memiliki bentuk modifikasi yang signifikan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan cenderung hanya melanjutkan program yang blm berjalan secara maksimal pada triwulan sebelumnya. Sehingga perubahan yang dihasilkan pada program tidak terlihat secara gamblang perbedaannya antara program sebelumnya.

3. Holistic Principal

Holistic principal atau prinsip keseluruhan merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam suatu perencanaan interaktif. Maksud dari prinsip holistik dalam perencanaan pembangunan adalah suatu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan banyak aspek secara menyeluruh dan merata, sehingga pembangunan yang dilakukan akan menghasilkan suatu keseimbangan dan keterkaitan satu fungsi dengan yang lainnya. Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, perencanaan nya harus meliputi aspek aspek yang lainnya seperti aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, spiritual, dan yang lainnya juga harus seimbang untuk dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan. Prinsip holistik dalam hal ini mengacu pada penilaian seberapa menyeluruh perencanaan pembangunan terutama pada pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan.

Prinsip holistik dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup terpenuhi dengan baik, dalam pelaksanaan program program terkait dengan pengembangan wilayah permukiman sudah di pertimbangkan aspek-aspek di sekelilingnya mulai dari manfaat, fungsi, anggaran dan juga lainnya. Dalam prinsip holistik terdapat 2 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan diantaranya,

a. Koordinasi

Pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, secara umum Bappeda hanya sebagai lead leader perencanaan sehingga untuk perencanaan lebih lanjut dilakukan oleh DP2CKTR sebagai dinas yang bersangkutan. Dalam hal ini selain DP2CKTR, OPD lain yang berkaitan dengan pengembangan wilayah permukiman juga harus paham dengan mekanisme perencanaan yang sesuai sehingga tidak terjadi sasaran program yang sama. Seperti koordinasi dengan Dinas Perizinan terkait dengan pengajuan perumahan baru, koordinasi dilakukan melalui online pada sistem OSS RBA kemudian di berikan kepada DP2CKTR untuk di tindak lanjuti kesesuaian dokumen dengan rencana tata ruang wilayah. Sejauh ini koordinasi dalam pengembangan wilayah permukiman sudah berjalan baik antara stakeholder, opd, dan juga masyarakat sehingga hal ini mendorong untuk terlaksananya kegiatan dengan efisien. Namun, masih ada beberapa hal yang belum jelas koordinasinya seperti perencanaan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang biasanya di susun oleh pihak penyelenggara bersamaan dengan dokumen perizinan yang dilakukan.

b. Integrasi

Pada pengembangan wilayah permukiman, integrasi antara stakeholder terkait sangat diperlukan. Bappeda sebagai pengarah dan perancang utama pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah dapat mengkoordinasikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang bersama dengan OPD dan stakeholder lainnya. DP2CKTR Ruang Kabupaten Sidoarjo sejauh ini telah melaksanakan tupoksinya dengan baik dengan berjalannya program yang telah di canangkan dalam rencana kerja terkait dengan pengembangan wilayah permukiman. Perencanaan pembangunan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga RPJMD Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi masalah tingginya angka kepadatan penduduk dan juga tingginya angka kebutuhan lahan.

KESIMPULAN

Dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Penerapan *Interactive Planning* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan telah diterapkan oleh para perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan perencanaan interaktif dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah berjalan baik tetapi belum optimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan tindakan yang belum dilakukan seperti masih banyaknya program perencanaan yang belum berjalan, kurangnya koordinasi antara DP2CKTR dengan OPD yang bersangkutan (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM), adanya miskomunikasi antara bidang di DP2CKRT, masih ada program yang tumpang tindih antara OPD yang berbeda. Sehingga penerapan *Interactive Planning* masih perlu dioptimalkan lagi dalam merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses perencanaan pembangunan, koordinasi memiliki artian yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan program yang ada. Pada pengembangan wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo, koordinasi yang dilakukan antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait sudah berjalan dengan cukup. Koordinasi antara OPD (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM) masih belum terjalin baik secara langsung maupun secara dokumen, masih sangat banyak miskomunikasi, sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan yang lainnya. Akibatnya, meskipun program pengembangan wilayah permukiman sudah dijalankan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja masih terdapat

banyak sekali evaluasi di setiap monitoring yang dilaksanakan yang kemudian berdampak pada lamanya waktu pengerjaan.

SARAN

Untuk meningkatkan penerapan Interactive Planning dalam perencanaan pengembangan permukiman di Kabupaten Sidoarjo DP2CKTR bersama dengan Dinas terkait (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPSTP, dan PDAM,) dalam proses penyusunan perencanaan lebih memperhatikan aspek-aspek yang belum dibahas dalam perencanaan seperti analisis dampak lingkungan, peningkatan program, dan yang lainnya. Proses pembahasan ini bisa dilakukan melalui pengadaaan pertemuan rapat triwulan atau pertemuan lain yang lebih efektif dilakukan sehingga perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih efektif dan optimal untuk mewujudkan visi misi yang ingin dicapai. Dengan banyaknya perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo terutama pada pengembangan wilayah permukiman diharapkan Pemerintah Daerah setempat dan stakeholder terkait lebih bisa menjaga koordinasi antara pihak demi keberhasilan rencana pembangunan yang telah disusun. Sebaiknya, disediakan media untuk berkoordinasi antara dinas dan stakeholder secara online misalnya penyediaan aplikasi/website seperti OSS yang diperuntukkan bagi kepentingan koordinasi program yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Bappeda, Dinas terkait (Dishub, DLHK, Dinas PU, dan PDAM), serta stakeholder lain untuk mengurangi adanya tumpangtindih program yang masih banyak terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Bappeda Sidoarjo. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Retrieved from <https://bappeda.sidoarjo.go.id>
- BPK RI. (2009). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
- BPK RI. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Muayyadah, N. (2020). Strategi penguatan sintesa partisipasi masyarakat dan manajemen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6(3), 100-107.
- Puspaningtyas, A. (2016). Integrasi perangkat daerah dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan*, 17-32.

- Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2020). Konflik sosial perebutan lahan perkebunan. *Journal Paradigma*, 11(1), 1–34.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/51013>
- Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan*, 8(2), 59-69.

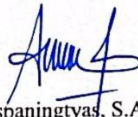
Lampiran 8 Tanda Persetujuan Skripsi

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Evinda Fenny Wulandari
NBI : 1112000069
Judul Skripsi : *Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah
Permukiman untuk Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

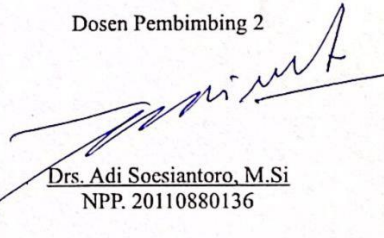
Surabaya, 06 Juni 2024

Dosen Pembimbing 1




Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP
NPP. 20110170734

Dosen Pembimbing 2



Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
NPP. 20110880136

Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email - fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evinda Fenny Wulandari
 NBI : 1112000069
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP
 Dosen Pembimbing II : Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perindugan lahan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Menurut Pasal 55-60 Perda Kab. Sidoarjo No.6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029
 Interactive Planning dalam pengembangan wilayah perumitan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	6/3 2024	Original (ok) kontrol ke dosen Fakta bisnis permutasi lahan ke lahan sesuai dgn pema - siap ke Bab. III		f
2	6/3 2024	Perbaiki Bab I-III, buat pedoman wawancara	Amf	
3	14/3 2024	Ganti konsep penelitian agar mudah dan terjangkau	Amf	
4	15/3 2024	konsep Interventif (planif?)		f
5	20/3 2024	ACC Bab I - III	Amf	
6	01/4 2024	1) Uraian Geisac Ok. 2) Uraian Ge. Capaian 3) Uraian Pemas		f
7	15/5 2024	1. Lanjutkan pembahasan data 2. Lanjutkan pembahasan hasil penelitian		f
8	22/5 2024	Lanjutkan pembahasan & Bab V Publikasi jurnal	Amf	
9	09/5 2025	Perbaiki bab V Rapiakan penyusunan skripsi	Amf	
10	31/5 2024	Saran : Safety teknis		f

15/5 2024
09/6/2024

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10 Pedoman Wawancara dan Transkrip Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Nanang Risdianto, S.T
 Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan, Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
 Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 Kabupaten Sidoarjo
 Hari/taggal : Jum'at, 3 Mei 2024
 Pertanyaan :

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Participative Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah)	1. Apakah dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda melibatkan stakeholder lain dalam perencanaannya?
		2. Apakah dalam proses perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman Bappeda Kabupaten Sidoarjo melibatkan partisipasi masyarakat?
		1. Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
		<p>stakeholder lain dan masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman yang sudah disusun oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo?</p>
<p>Countinuity Principle</p>	<p>RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="906 707 1233 1112">1. Apakah Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki program berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaen Sidoarjo? <li data-bbox="906 1112 1233 1649">2. Apakah terdapat pengembangan yang perlu dilakukan pada program yang telah direncanakan sebelumnya oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pengembangan wilayah terutama pada pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?
<p>Holistic Principle</p>	<p>RPJMD (Rencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="906 1649 1233 1684">1. Bagaimana sejauh ini

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
	<p>Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur</p>	<p>pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda di Kabupaten Sidoarjo secara umum?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah sesuai dengan RPJMD dan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029?</p> <p>3. Bagaimana Bappeda mengatur perencanaan pembangunan terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?</p> <p>4. Apakah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo terutama</p>

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
		pada pengembangan wilayah pemukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?
		5. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Sidoarjo dengan stakeholder lainnya dalam perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo terutama pada pengembangan wilayah pemukiman?

TRANSKRIP WAWANCARA

P = Pewawancara

P: Sebelumnya terimakasih bapak atas ketersediaan waktunya untuk dapat melakukan wawancara dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Evinda Fenny Wulandari biasanya dipanggil dengan Evinda, mahasiswa Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya bertempat tinggal di Tanggulangin tepatnya pak. Seperti yang sudah saya lampirkan pada permohonan surat sebelumnya, tujuan saya menemui bapak pada hari ini adalah untuk melakukan wawancara dengan bapak terkait dengan skripsi saya yang berjudul interactive planning dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Disini saya memohon bantuan dari Bapak selaku staff dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menjadi informan dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya ya pak

NR: Baik mbak, ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nanang Risdianto, di Bappeda sendiri saya merupakan staff bidang Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan. Jadi terkait dengan pengembangan wilayah di

Kabupaten Sidoarjo biasanya bidang saya yang dibantu oleh teman-teman ini yang menanganinya.

P: Baik bapak terimakasih, sebelumnya mohon maaf bapak untuk wawancara hari ini saya izin untuk merekam hasilnya ya pak. Apakah berkenan?

NR: Iya silahkan saja

P: Baik bisa saya mulai ya pak, untuk kegiatan wawancaranya

NR: Silahkan bisa dimulai, insyaallah saya akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang saya ketahui

P: baik, untuk yang pertama ingin saya tanyakan secara global dulu ya pak, menurut bapak Nanang bagaimana sejauh ini pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda di Kabupaten Sidoarjo secara umum?

NR: Ini langsung saya jawab ya boleh, jadi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini mengacu pada RPJP, RPJMD, dan RKPD yang kemudian mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Dimana dalam perencanaannya dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang tertera pada RPJMD Tahun 2021-2026

P: Baik jadi secara umum pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada ya pak, lalu apakah pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah sesuai dengan RPJMD dan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029?

NR: Perencanaan pembangunan sejauh ini sudah sesuai dengan RPJMD, dan memang harus disesuaikan dengan RPJMD karena kan RPJMD sebagai acuan dasar kita kan dalam merencanakan pembangunan apa saja yang perlu dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini. Nah kemudian setelah itu, perencanaan pembangunannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 atau biasa kita sebut sebagai RDTL dan yang paling utama dengan rencana tata ruang wilayah atau kita biasa sebut dengan RTRW ya yang diatur itu di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Kalo ditinjau sudah sesuai semua baru nanti akan dirancang secara lebih teknis lagi dan diserahkan ke pihak-pihak yang bersangkutan dan lebih berwenang.

P: baik pak, kemudian untuk itu karena dilakukan dengan acuan dokumendokumen terkait ya pak, bagaimana Bappeda mengatur perencanaan pembangunan terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?

NR: Begini, untuk mengatur perencanaan pembangunan kan tadi sudah disebutkan bahwa acuannya ada dari RPJMD dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan ya. Nah selain itu, karena sekarang sudah jamannya teknologi, kita mengatur itu semua melalui online. Ada itu website nya namanya OSS atau Online Single Submission, nah ini untuk mekanisme perizinan semuanya ada disini termasuk untuk rencana tata ruang jadi Bappeda bisa memantai rencana pembangunan itu juga lewat sini, OSS ini udah berjalan cukup lama ya dari tahun 2018 sampai sekarang dan dengan pengembangan juga pastinya setiap tahun.

P: dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo kan semuanya telah diatur ya pak dalam dokumen teknis dan yang lainnya, lalu apakah Bappeda melibatkan stakeholder lain dalam perencanaannya?

NR: Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda tidak hanya bekerja sendiri mbak melainkan juga melibatkan peran dari stakeholder lain seperti dinas-dinas terkait. Misalnya ya yang paling utama dengan Dinas Perumahan, Permukiman, Cita Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) karena itu merupakan tupoksi mereka untuk mengurus masalah lahan tempat tinggal dan tata ruang, kemudian dengan dinas lain seperti DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga, Dishub, DLHK, dan dinas-dinas teknis lainnya yang berhubungan dengan rencana pengembangan wilayah permukiman. Selain dinas kita juga berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan penyedia, forum PKP, swasta, dan juga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Perencanaan yang disusun sendiri juga merupakan bentuk usulan dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan isu-isu yang ada dan juga mencapai tujuan menjadi Sidoarjo yang berkelanjutan

P: untuk proses perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman Bappeda Kabupaten Sidoarjo kan melibatkan para pemangku kepentingan yang lainnya, nah apakah disitu partisipasi masyarakat juga dilibatkan pak?

NR: Seperti jawaban saya sebelumnya, ada pasti. Bappeda selain melibatkan stakeholder lain juga melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Karena ya bagaimanapun pembangunan ini kan tujuannya

untuk mensejahterahkan masyarakat, jadi sangat perlu adanya partisipasi masyarakat ini dalam perencanaan.

P: Karena dilibatkan ya pak, bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh stakeholder lain dan masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman yang sudah disusun oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo?

NR: Bentuk partisipasi yang ada terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman secara lebih teknisnya ada di DP2CKTR, pihak Bappeda hanya melakukan perencanaan secara umum yang berkaitan dengan RPJP dan RPJMD yang sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pembangunan. Pedoman yang dimaksud berisi penyusunan tema, isu-isu perumusan dengan melibatkan unsur lain diluar Bappeda seperti masyarakat dan profesional melalui kegiatan musrenbang

P: Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang prinsip berkelanjutan ya pak Nanang, dalam hal ini apa Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki program berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?

NR: Untuk program berkelanjutan ini biasanya berupa penjabaran dari dokumen-dokumen yang telah disusun sebelumnya secara umum dan universal ya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibutuhkan dokumen teknis nya melalui RP3KP dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hanya sebatas itu, jadi program berkelanjutan yang disusun oleh Bappeda hanya sampai di perencanaan administratif secara umum dan teknis nya saja. untuk selanjutnya bagaimana program itu diatur seperti perumahan, rusun, dan yang lainnya lebih detail akan diatur oleh dinas terkait yang menangani yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang

P: Jadi ada ya pak programnya, namun lebih rincinya dibuat oleh DP2CKTR. Nah, dari program yang dicanangkan tersebut, menurut bapak apakah terdapat pengembangan yang perlu dilakukan pada program yang telah direncanakan sebelumnya oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pengembangan wilayah terutama pada pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?

NR: Untuk pengembangan program berkelanjutan ini kita ada indikasi program 5 tahunanmbak, seperti menyusun dokumen teknis 5 tahunan kemudian melakukan evaluasi. Nah untuk pengembangan program ini biasanya kita lihat dulu hasil evaluasinya bagaimana baru bisa kita tindak lanjuti solusi dan penyelesaiannya.

Untuk itu semuanya ada acuannya masing-masing ada pedoman seperti pedoman penyusunan RPJMD, pedoman tata ruang, kemudian ada mekanismenya, dan yang secara rinci sekali dibahas pada renstra dan renja.

P: Baik selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai prinsip keseluruhan pak, Apakah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo terutama pada pengembangan wilayah pemukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?

NR: jadi dalam perencanaan itu semuanya ada masing-masing acuannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan masing-masing acuan tersebut kemudian membentuk strategi-strategi yang digunakan untuk mengeksekusi rencana yang ada. Nah untuk itu diperlukan banyak sekali peran baik dari stakeholder lain, masyarakat, dinas-dinas yang hampir seluruhnya terlibat. Jadi untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah memenuhi prinsip holistik ini karena dalam perencanaannya sudah dipikirkan semua aspek yang nanti akan terlibat

P: Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Sidoarjo dengan stakeholder lainnya dalam perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo terutama pada pengembangan wilayah pemukiman?

NR: Kalau untuk koordinasi sendiri itu kita lakukan pertama pasti melalui musrenbang ya mbak, jadi untuk merumuskan apa saja yang perlu direncanakan yang kemudian dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Kemudian untuk koordinasi lebih lanjut kita ada triwulan untuk evaluasinya. Kalo koordinasi secara garis besar melalui OSS.

P: Baik pak, kalau begitu terimakasih. Jadi sejauh ini terkait dengan pengembangan wilayah permukiman fokusnya lebih banyak berada di DP2CKTR ya bapak

NR: Benar, karena kami bappeda kan selalu badan perencanaan umum ya jadi kami hanya merancang secara garis besar. Nah nanti kemudian akan dibuat program seperti apa, itu kita rapatkan melalui musrenbang itu agar kita mendapat gambaran dari isu-isu yang ada di masyarakat juga. Nah kemudian lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di rancangan kerja dan strategis dari instansi masing-masing sesuai tupoksi mereka. Baru kemudian nanti akan di cek sama bappeda apakah ini bisa dilakukan atau tidaknya. Begitu kiranya mbak

P: Baik kalau begitu terimakasih telah menjawab pak, dikarenakan itu adalah pertanyaan terakhir untuk penelitian saya. Bapak terimakasih sekali ya karena sudah bersedia untuk membantu penelitian saya dan meluangkan sedikit waktunya untuk dapat saya wawancarai

NR: Iya sama-sama mbak, saya sangat senang jika jawaban saya dapat membantu. Semoga skripsinya cepat selesai ya dan dilancarkan. Saya juga berterimakasih karena nanti dampaknya juga akan kembali ke kami

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Ibu Asri
 Bidang Tata Ruang di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKRT) Kabupaten Sidoarjo

Tempat : Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Hari/tanggal : Jum'at, 3 Mei 2024

Pertanyaan :

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Partisipative Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah)	1. Apakah dalam penyusunan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melibatkan stakeholder lain dalam proses perencanaannya?
		2. Apakah partisipasi masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan rencana strategis yang telah disusun untuk proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
		<p>3. Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh stakeholder lain dan masyarakat dalam mewujudkan Rencana Strategis yang telah disusun dalam rencana pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?</p>
<p>Countinuity Principle</p>	<p>RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur</p>	<p>1. Apakah Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo memiliki program berkelanjutan dalam penyusunan Renstra pengembangan wilayah pemukiman?</p> <p>2. Apakah terdapat pengembangan yang perlu dilakukan pada program yang telah direncanakan sebelumnya dalam pelaksanaan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?</p>

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Holistic Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	<p>1. Apakah dalam penyusunan rencana strategis yang dilakukan Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan pengembangan wilayah pemukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?</p>
		<p>2. Apakah terdapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan renstra terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo dengan Bappeda dan Dinas-Dinas Terkait lainnya?</p>
		<p>3. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mewujudkan rencana strategis yang telah disusun</p>

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
		oleh masing-masing instansi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan RPJMD Kab. Sidoarjo?

TRANSKRIP WAWANCARA

P = Pewawancara, A= Informan Wawancara

P: Sebelumnya terimakasih Ibu atas ketersediaan waktunya untuk dapat melakukan wawancara dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Evinda Fenny Wulandari biasanya dipanggil dengan Evinda, mahasiswa Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya bertempat tinggal di Tanggulangin tepatnya pak. Seperti yang sudah saya lampirkan pada permohonan surat sebelumnya, tujuan saya menemui bapak pada hari ini adalah untuk melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan skripsi saya yang berjudul *interactive planning* dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Disini saya memohon bantuan dari ibu selaku staff dari Bidang Tata Ruang di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKRT) Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menjadi informan dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya ya bu

A: Baik mbak, ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nanang Ibu Asri, di DP2CKTR sendiri saya merupakan staff bidang tata ruang. Jadi biasanya saya dan teman-teman melayani penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo sebelum dilakukan pembangunan. Sebenarnya kalo dilihat dari penelitiannya ini bukan di bidang saya ya fokusnya tapi tidak apa apa

P: Baik ibu terimakasih atas waktunya dan telah berkenan di wawancara ya bu, sebelumnya mohon maaf bu untuk wawancara hari ini saya izin untuk merekam hasilnya ya pak. Apakah berkenan?

NR: untuk hasil wawancaranya jika saya tulis di pedoman ini saja apakah boleh ya mbak? Soalnya mungkin ada beberapa hal yang saya tidak mengerti karena bukan bidangnya

P: Baik boleh bu, apakah bisa saya mulai sekarang ya bu untuk kegiatan wawancaranya

A: Silahkan bisa dimulai, insyaallah saya akan jawab dan berikan informasi sesuai dengan apa yang saya ketahui

P: Baik bu, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan partisipasi ya bu, Apakah dalam penyusunan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melibatkan stakeholder lain dalam proses perencanaannya?

A: Okey, ini sambil saya jawab ya mbak. Jadi dalam proses penyusunan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman tentu saja melibatkan stakeholder lain, dinas terkait, dan juga masyarakat. Partisipasi dari takeholder lain dan pihak-pihak terkait ini dilakukan sejalan dengan perencanaan kita yang melibatkan beberapa aspek yang diperlukan seperti terkait dengan transpotasi, lingkungan hidup, perairan dan yang lainnya. Partisipasi masyarakat juga diperlukan sebagai usulan untuk program yang akan direncanakan, karena dari masyarakat muncul beberapa isu yang harus diselesaikan dan ditindak lanjuti. Untuk renstra tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Bappeda sebelum di implementasikan

P: Lalu, kan melibatkan banyak pemangku kepentingan juga ya bu, apakah dalam hal ini partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pelaksanaan rencana strategis yang telah disusun untuk proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?

A: Tentu, untuk perumusan renstra ini jelas diperlukan partisipasi masyarakat ya dalam perencanaannya, karena kita juga membutuhkan pendapat dari masyarakat yang dalam hal ini merupakan pihak yang dilayani untuk dapat membuat perencanaan-perencanaan apa saja yang diperlukan. Dan hal-hal yang kami rumuskan dan susun dalam perencanaan serta program-program yang kami canangkan juga berasal dari masalah yang ada di masyarakat.

P: Baik jadi semuanya dilibatkan ya bu hingga ke masyarakat juga, nah karena dilibatkan apakah boleh dijelaskan bu bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh stakeholder lain dan masyarakat dalam mewujudkan Rencana Strategis yang telah disusun dalam rencana pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo?

A: untuk mewujudkan rencana strategis yang telah kita susun dalam rencana pengembangan wilayah permukiman tentu saja melibatkan stakeholder lain dan masyarakat. Bentuk partisipasinya ya melalui musrenbang untuk koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa yang nantinya dari semua pendapat, keluhan, isu, dan masalah yang kami dapatkan dari hasil musyawarah itu kemudian akan di gambarkan dalam pohon kinerja untuk dikaji dan di implementasikan sesuai dengan urgensi nya masing-masing.

P: Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan terkait dengan keberlanjutan ya bu, pertama apakah Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo memiliki program berkelanjutan dalam penyusunan Renstra pengembangan wilayah pemukiman?

A: Iya, ada kami punya program berkelanjutan dalam penyusunan renstra kita itu ada di penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakomodir RPJMD dan RPJP. Jadi RTRW kan sudah dijelaskan bagaimana pembagian wilayahnya, nah untuk program itu disusun sesuai dengan RPJMD. Jadi apakah ada program berkelanjutan jawabannya ada sesuai dengan perencanaan jangka pendek dan menengah yang kita rancang. Untuk program pengembangan wilayah itu kita ada beragam dari perumahan, permukiman, rumah susun, program permukiman dan perumahan kumuh, dan yang lainnya

P: Baik bu, kalau boleh tau untuk program-program ini dikembangkan mulai kapan ya bu?

A: sudah dari lama mbak dan terus dikembangkan juga kayaknya mulai sekitar tahun 2018 yaa

P: Baik, sebelumnya saya mau menanyakan hal lain ya bu. Untuk perumahan di Kabupaten Sidoarjo itu kan lumayan banyak ya bu, apakah itu ada data pasti terkait dengan jumlahnya? Dan yang lainnya juga seperti rumah susun dan permukiman

A: Oke, untuk data jelas ada dong, kan itu nanti yang kita laporkan setiap tahun. Jadi kalo perumahan itu kalo enggak salah ya sesuai dengan recap data terakhir itu

jumlahnya kurang lebih ada sekitar 520 perumahan di Sidoarjo ini dan itu hampir di semua daerah SSWP ada. Lalu untuk rusun itu sampai saat ini Sidoarjo punya 6 rusun, nanti bisa di lihat di maps aja ya letaknya di daerah mana saja. kalo permukiman ini jelas lebih banyak karena kan ya mayoritas tinggal di wilayah perkampungan kalo di Sidoarjo.

P: Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya bu, Apakah terdapat pengembangan yang perlu dilakukan pada program yang telah direncanakan sebelumnya dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?

A: Untuk pengembangan wilayah permukiman dan perumahan itu berbeda. Kalau Permukiman itu lebih ke wilayah yang ada di perkampungan dan kalau perumahan berarti dikelola oleh pihak yang mendirikan perumahan ada yang di dalam wilayah perkampungan dan banyak di wilayah perkotaan. Baik permukiman maupun perumahan itu sudah merata di semua wilayah, jumlah perumahan di Sidoarjo sendiri kurang lebih sebanyak 520 perumahan. Selain itu kita juga ada program lain seperti rumah susun, rumah relokasi bencana alam, urusan permukiman kumuh juga dan itu semua tersusun di rencana kerja kami. Jadi jika programnya masih kurang berjalan akan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut di tahun berikutnya

P: jadi untuk program sendiri masih fokus di program yang ada untuk di kembangkan ya bu, belum ada rencana program baru

A: Bener

P: Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bu, Apakah dalam penyusunan rencana strategis yang dilakukan Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?

A: Sebelum menyusun perencanaan pengembangan wilayah permukiman. Ya bukan hanya pengembangan wilayah permukiman tapi seluruh pengembangan wilayah itu kita memikirkan aspek-aspek di sekelilingnya juga, manfaat, fungsi, anggaran, dan yang lainnya. Selain itu juga, memikirkan berbagai pendapat yang kami dapatkan dari pihak-pihak yang berkaitan dan berpartisipasi. Jadi prinsip holistik dalam perencanaan pengembangan wilayah menurut saya sudah terpenuhi.

P: Apakah terdapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan renstra terkait

dengan pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo dengan Bappeda dan Dinas-Dinas Terkait lainnya?

A: Ada, jelas ada karena kita tidak mungkin berjalan sendiri dalam mengimplementasikan rencana kerja dan rencana strategis kami. Karena melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya pasti ada koordinasi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan itu agar rencana kerjanya berjalan sesuai dengan apa yang akan dicapai.

P: Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mewujudkan rencana strategis yang telah disusun oleh masing-masing instansi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan RPJMD Kab. Sidoarjo?

A: Bentuk koordinasi nya macam-macam ya tapi kebanyakan sekarang sudah melalui online mbak. Misalnya, Untuk perizinan sendiri kita berkoordinasi dengan DPMPTSP, Itu dilaksanakan secara online ya sekarang semuanya melalui OSS jadi untuk pihak penyelenggara yang ingin mengurus perizinan terkait dengan perumahan baru atau izin lainnya biasanya mengurus dokumennya secara online. Baru nanti kalau dokumennya sudah lengkap akan kami cek untuk kesesuaian dengan RTRW atau tidak. Jika dokumen dan permohonan sesuai bisa di proses, jika tidak ya kami tolak. Dan melalui OSS kan juga bisa dilihat oleh pihak Bappeda sendiri ya. Lalu untuk pelaporannya kami lakukan setiap tiga bulan sekali melalui triwulan.

P: Jadi sejauh ini koordinasi memang online melalui oss ya bu, dan baru nanti lebih lanjutnya di rapat triwulan

A: iya mbak bener

P: Baik bu, karena itu pertanyaan terakhir terimakasih karena ketersediaannya untuk membantu saya dalam penelitian ini ya

A: dengan senang hati, semoga lancar-lancar yaa skripsinya

P: Terimakasih banyak bu atas doa nya

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Saudara Andrea Rama Wijaya
 Sekretaris RT 08 Perumtas II Desa Kalisampurno

Tempat : Perumahan Tas II Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Sidoarjo

Hari/taggal : Rabu, 3 Juli 2024

Pertanyaan :

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Participative Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah)	1. Apakah dalam proses perencanaan pembangunan yang dalam hal ini pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Pihak RT dan RW di wilayah kelurahan juga dilibatkan dalam proses perencanaannya?
		2. Apakah partisipasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan juga diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?
		3. Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah di tingkat kelurahan dalam rencana pengembangan

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
		wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?
Continuity Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	<p>1. Dalam pengembangan wilayah permukiman, DP2CKTR memiliki program khusus yang terkait dengan wilayah permukiman dan perumahan. Lalu, dari program yang sudah dicanangkan, apakah pihak kelurahan sejauh ini sudah menerapkan atau memiliki program khusus lainnya di wilayah kelurahan dalam pengembangan wilayah permukiman?</p> <p>2. Dari rangkaian program yang telah dicanangka, apakah terdapat pengembangan yang perlu di dilakukan dalam pengembangan wilayah permukiman?</p>
Holistic Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten	1. Apakah, dalam penyusunan rencana strategis di tingkat kelurahan untuk rencana pengembangan wilayah permukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
	Sidoarjo, Jawa Timur	<p>2. Bagaimana peran dari para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah perangkat desa dalam pengembangan wilayah permukiman?</p> <p>3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh RT dan RW serta pihak desa dalam pengembangan wilayah permukiman dengan instansi terkait?</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

P= Pewawancara, AR= Informan, EA=Informan

P= Baik bapak, selamat pagi mohon maaf sebelumnya karena saya mengganggu waktunya ya pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evinda Fenny Wulandari, saya mahasiswa administrasi publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tujuannya menemui bapak adalah untuk melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya yang berjudul interactive planning dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, jadi mohon bantuannya ya bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya lampirkan

AR : Iya tidak apa-apa mbak, sebelumnya sudah kenal dengan saya belum ya?

EA: Tidak apa silahkan saja mbak

P: Sudah pak, tapi apakah berkenan untuk kembali memperkenalkan diri pak dan juga moho izin apakah boleh saya rekam wawancaranya?

AR: Iya silahkan saja. oke saya kenalkan diri ya, Nama saya Andrea Rama Wijaya disini di perumahan ini sebagai sekretaris RW jabatannya yang membantu pak RW

EA: Kalau saya Elang Aziz Saputra, saya pengurus RW di Desa Kalisampurno. Kalo mas andre kan di perumahan ya kalo saya di desa nya

P: Baik apa bisa saya mulai pak?

AR: Boleh silahkan saja

P: Baik masuk ke pertanyaan pertama ya pak, Apakah dalam proses perencanaan pembangunan yang dalam hal ini pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Pihak RT dan RW di wilayah kelurahan juga dilibatkan dalam proses perencanaannya?

AR: Jawaban dari saya dulu ya mbak, iya dilibatkan kami pihak RT RW dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman bersama dengan perangkat desa lainnya tapi hanya sebatas tingkat kelurahan saja

EA: Benar dilibatkan, biasanya lewat musrenbang yang diadakan oleh kelurahan ya. Nah selain RT RW biasanya juga ada perangkat desa lain dan perwakilan dari beberapa kelompok masyarakat seperti karang taruna dan yang lainnya juga

P: Baik, karena melibatkan banyak pihak ya pak, nah apakah partisipasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan juga diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?

AR: Dilibatkan mbak masyarakat, kan kami juga termasuk masyarakat ya. Tapi kalo secara teknisnya masyarakat disini mungkin warga ya. Itu pasti dilibatkan karena kan yang merasakan pembangunannya juga masyarakat

EA: Dilibatkan mbak masyarakat melalui para pemangku kepentingan itu di tiap kelompok perwakilan, semuanya terlibat termasuk masyarakat juga

P: Baik, lalu bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah di tingkat kelurahan dalam rencana pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?

AR: bentuk partisipasinya melalui usulan usulan yang kami berikan saat rapat. Jadi dari masalah yang ada di wilayah saya biasanya saya kumpulkan dulu apa saja keluhannya warga kemudian nanti saya sampaikan dalam forum

EA: Benar, melalui usulan tapi juga pendapat karena pasti kan pihak kelurahan juga sudah punya rencana nah nanti partisipasi kita adalah berdiskusi apakah itu nanti

ususnya akan berdampak jika dilaksanakan atau tidaknya dan diskusi juga sih mbak terkait program-program dan rancangan lainnya

P: Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan prinsip berkelanjutan ya pak, Dalam pengembangan wilayah permukiman, DP2CKTR memiliki program khusus yang terkait dengan wilayah permukiman dan perumahan. Lalu, dari program yang sudah dicanangkan, apakah pihak kelurahan sejauh ini sudah menerapkan atau memiliki program khusus lainnya di wilayah kelurahan dalam pengembangan wilayah permukiman?

EA: diterapkan tapi enggak semuanya mbak, kalo di desa biasanya ya terkait dengan rumah atau permukiman kumuh, terus tempat tinggal di bantaran sungai itu, nah kalo perumahan beda lagi ya soalnya beda wilayah. Selebihnya kalo rumah susun disini belum ada karena mungkin ya gak urgen sih

AR: Betul, kalo di kita ya perumahan aja sih mbak. Sebenarnya dari desa juga sudah menerapkan tapi kan wilayah perumahan sm desa ini beda jadi kalo di wilayah perumahan sendiri ya Cuma pengembangan perumahan aja.kalo program khusus dari perumahan sejauh ini yang saya tau enggak ada.

P: Dari rangkaian program yang telah dicanangka, apakah terdapat pengembangan yang perlu di dilakukan dalam pengembangan wilayah permukiman?

EA: Udah berjalan semua, mungkin pelaksanaannya aja ya yang bisa ditangani lebih cepat gitu. Tapi ini dari pihak desa juga urusannya tindak lanjut. Sejah ini berjalan baik, kalo ada perbaikan dan pengembangan ya pasti kan namanya juga program

AR: Benar, sudah berjalan Cuma yang perlu dikembangkan mungkin tindak lanjut evaluasinya aja

P: Apakah, dalam penyusunan rencana strategis di tingkat kelurahan untuk rencana pengembangan wilayah permukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?

AR: Holistik ini maksudnya gimana?

P: jadi dalam rencana pengembangannya itu sudah memikirkan aspek aspek lainnya pak, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan

AR: oo begitu, kalau saya rasa sudah sih mbak soalnya disini kan juga bukan Cuma permukiman aja tapi juga ada tempat-tempat yang digunakan untuk keperluan lain kayak pasar, umkm, terus industri juga ada jadi menurut saya sudah holistik sih

sudah memikirkan aspek itu. Cuma disini yang masih kurang itu masih bau lumpur lapindo biasanya kadang karena kan dekat ya

EA: Sudah mbak, menurut saya sudah bersifat keseluruhan lah pembangunannya Cuma ya itu sih kemaren sempat ya terdampak itu lumpur sama pembangunan jalan arteri

P: baik, lalu Bagaimana peran dari para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah perangkat desa dalam pengembangan wilayah permukiman?

EA: Peran dalam apa? Kalo untuk mengatasi masalah pengembangan wilayah permukiman sejauh ini selalu tepat sasaran ya mbak. Cuma kalo untuk selain itu kayak arteri dan lumpur lapindo kan itu diluar tanggung jawab kelurahan seharusnya ya

AR: Peran perangkat desa sejauh ini sudah oke sih mbak, tepat waktu dan sasara juga

P: Baik masuk ke pertanyaan terakhir ya pak, Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh RT dan RW serta pihak desa dalam pengembangan wilayah permukiman dengan instansi terkait?

EA: untuk koordinasi kita secara online dan offline. Kalo antar kelurahan ya biasanya kita langsung sih ke kelurahan atau lewat forum dan misalnya urgen banget kita lewat online biasanya by wa atau email ke kelurahan. Kalo dari kelurahan ke pusat biasanya juga sama,

AR: Secara online dan offline tergantung kebutuhan aja mbak seperti apa. Biasanya hasil usulan itu nanti dibawa ke musrenbang kecamatan atau pusat nah untuk koordinasinya sendiri ya bisa online dan offline seperti yang dikatakan mas elang

P: Baik bapak, itu pertanyaan terakhir dari penelitian saya. Terimakasih atas jawaban dan waktunya ya pak

AR: iyaa sama-sama semoga membantu ya

EA: sama-sama mbak, senang bisa membantu

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Saudara Elang Aziz Saputra
 Sekretaris RT 08 Perumtas II Desa Kalisampurno
 Tempat : Perumahan Tas II Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Sidoarjo
 Hari/taggal : Rabu, 3 Juli 2024
 Pertanyaan :

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Participative Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah)	4. Apakah dalam proses perencanaan pembangunan yang dalam hal ini pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Pihak RT dan RW di wilayah kelurahan juga dilibatkan dalam proses perencanaannya?
		5. Apakah partisipasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan juga diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?
		6. Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah di tingkat kelurahan dalam rencana pengembangan

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
		wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?
Continuity Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	<p>3. Dalam pengembangan wilayah permukiman, DP2CKTR memiliki program khusus yang terkait dengan wilayah permukiman dan perumahan. Lalu, dari program yang sudah dicanangkan, apakah pihak kelurahan sejauh ini sudah menerapkan atau memiliki program khusus lainnya di wilayah kelurahan dalam pengembangan wilayah permukiman?</p> <p>4. Dari rangkaian program yang telah dicanangka, apakah terdapat pengembangan yang perlu di dilakukan dalam pengembangan wilayah permukiman?</p>
Holistic Principle	RPJMD (Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah) dan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo, Kabupaten	4. Apakah, dalam penyusunan rencana strategis di tingkat kelurahan untuk rencana pengembangan wilayah permukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
	Sidoarjo, Jawa Timur	5. Bagaimana peran dari para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah perangkat desa dalam pengembangan wilayah permukiman?
		6. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh RT dan RW serta pihak desa dalam pengembangan wilayah permukiman dengan instansi terkait?

TRANSKRIP WAWANCARA

P= Pewawancara, AR= Informan, EA=Informan

P= Baik bapak, selamat pagi mohon maaf sebelumnya karena saya mengganggu waktunya ya pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evinda Fenny Wulandari, saya mahasiswa administrasi publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tujuannya menemui bapak adalah untuk melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya yang berjudul interactive planning dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, jadi mohon bantuannya ya bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya lampirkan

AR : Iya tidak apa-apa mbak, sebelumnya sudah kenal dengan saya belum ya?

EA: Tidak apa silahkan saja mbak

P: Sudah pak, tapi apakah berkenan untuk kembali memperkenalkan diri pak dan juga moho izin apakah boleh saya rekam wawancaranya?

AR: Iya silahkan saja. oke saya kenalkan diri ya, Nama saya Andrea Rama Wijaya disini di perumahan ini sebagai sekretaris RW jabatannya yang membantu pak RW

EA: Kalau saya Elang Aziz Saputra, saya pengurus RW di Desa Kalisampurno. Kalo mas andre kan di perumahan ya kalo saya di desa nya

P: Baik apa bisa saya mulai pak?

AR: Boleh silahkan saja

P: Baik masuk ke pertanyaan pertama ya pak, Apakah dalam proses perencanaan pembangunan yang dalam hal ini pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Pihak RT dan RW di wilayah kelurahan juga dilibatkan dalam proses perencanaannya?

AR: Jawaban dari saya dulu ya mbak, iya dilibatkan kami pihak RT RW dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman bersama dengan perangkat desa lainnya tapi hanya sebatas tingkat kelurahan saja

EA: Benar dilibatkan, biasanya lewat musrenbang yang diadakan oleh kelurahan ya. Nah selain RT RW biasanya juga ada perangkat desa lain dan perwakilan dari beberapa kelompok masyarakat seperti karang taruna dan yang lainnya juga

P: Baik, karena melibatkan banyak pihak ya pak, nah apakah partisipasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan juga diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?

AR: Dilibatkan mbak masyarakat, kan kami juga termasuk masyarakat ya. Tapi kalo secara teknisnya masyarakat disini mungkin warga ya. Itu pasti dilibatkan karena kan yang merasakan pembangunannya juga masyarakat

EA: Dilibatkan mbak masyarakat melalui para pemangku kepentingan itu di tiap kelompok perwakilan, semuanya terlibat termasuk masyarakat juga

P: Baik, lalu bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah di tingkat kelurahan dalam rencana pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo?

AR: bentuk partisipasinya melalui usulan usulan yang kami berikan saat rapat. Jadi dari masalah yang ada di wilayah saya biasanya saya kumpulkan dulu apa saja keluhannya warga kemudian nanti saya sampaikan dalam forum

EA: Benar, melalui usulan tapi juga pendapat karena pasti kan pihak kelurahan juga sudah punya rencana nah nanti partisipasi kita adalah berdiskusi apakah itu nanti usulannya akan berdampak jika dilaksanakan atau tidaknya dan diskusi juga sih mbak terkait program-program dan rancangan lainnya

P: Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan prinsip berkelanjutan ya pak, Dalam pengembangan wilayah permukiman, DP2CKTR memiliki program khusus yang terkait dengan wilayah permukiman dan perumahan. Lalu, dari program yang sudah dicanangkan, apakah pihak kelurahan sejauh ini sudah menerapkan atau memiliki program khusus lainnya di wilayah kelurahan dalam pengembangan wilayah permukiman?

EA: diterapkan tapi enggak semuanya mbak, kalo di desa biasanya ya terkait dengan rumah atau permukiman kumuh, terus tempat tinggal di bantaran sungai itu, nah kalo perumahan beda lagi ya soalnya beda wilayah. Selebihnya kalo rumah susun disini belum ada karena mungkin ya gak urgen sih

AR: Betul, kalo di kita ya perumahan aja sih mbak. Sebenarnya dari desa juga sudah menerapkan tapi kan wilayah perumahan sm desa ini beda jadi kalo di wilayah perumahan sendiri ya Cuma pengembangan perumahan aja. kalo program khusus dari perumahan sejauh ini yang saya tau enggak ada.

P: Dari rangkaian program yang telah dicanangka, apakah terdapat pengembangan yang perlu di dilakukan dalam pengembangan wilayah permukiman?

EA: Udah berjalan semua, mungkin pelaksanaannya aja ya yang bisa ditangani lebih cepat gitu. Tapi ini dari pihak desa juga urusannya tindak lanjut. Sejahter ini berjalan baik, kalo ada perbaikan dan pengembangan ya pasti kan namanya juga program

AR: Benar, sudah berjalan Cuma yang perlu dikembangkan mungkin tindak lanjut evaluasinya aja

P: Apakah, dalam penyusunan rencana strategis di tingkat kelurahan untuk rencana pengembangan wilayah permukiman telah mempertimbangkan prinsip holistik?

AR: Holistik ini maksudnya gimana?

P: jadi dalam rencana pengembangannya itu sudah memikirkan aspek aspek lainnya pak, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan

AR: oo begitu, kalau saya rasa sudah sih mbak soalnya disini kan juga bukan Cuma permukiman aja tapi juga ada tempat-tempat yang digunakan untuk keperluan lain kayak pasar, umkm, terus industri juga ada jadi menurut saya sudah holistik sih sudah memikirkan aspek itu. Cuma disini yang masih kurang itu masih bau lumpur lapindo biasanya kadang karena kan dekat ya

EA: Sudah mbak, menurut saya sudah bersifat keseluruhan lah pembangunannya Cuma ya itu sih kemaren sempat ya terdampak itu lumpur sama pembangunan jalan arteri

P: baik, lalu Bagaimana peran dari para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah perangkat desa dalam pengembangan wilayah permukiman?

EA: Peran dalam apa? Kalo untuk mengatasi masalah pengembangan wilayah permukiman sejauh ini selalu tepat sasaran ya mbak. Cuma kalo untuk selain itu kayak arteri dan lumpur lapindo kan itu diluar tanggung jawab kelurahan seharusnya ya

AR: Peran perangkat desa sejauh ini sudah oke sih mbak, tepat waktu dan sasara juga

P: Baik masuk ke pertanyaan terakhir ya pak, Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh RT dan RW serta pihak desa dalam pengembangan wilayah permukiman dengan instansi terkait?

EA: untuk koordinasi kita secara online dan offline. Kalo antar kelurahan ya biasanya kita langsung sih ke kelurahan atau lewat forum dan misalnya urgen banget kita lewat online biasanya by wa atau email ke kelurahan. Kalo dari kelurahan ke pusat biasanya juga sama,

AR: Secara online dan offline tergantung kebutuhan aja mbak seperti apa. Biasanya hasil usulan itu nanti dibawa ke musrenbang kecamatan atau pusat nah untuk koordinasinya sendiri ya bisa online dan offline seperti yang dikatakan mas elang

P: Baik bapak, itu pertanyaan terakhir dari penelitian saya. Terimakasih atas jawaban dan waktunya ya pak

AR: iyaa sama-sama semoga membantu ya

EA: sama-sama mbak, senang bisa membantu

Lampiran 11 Dokumentasi Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara

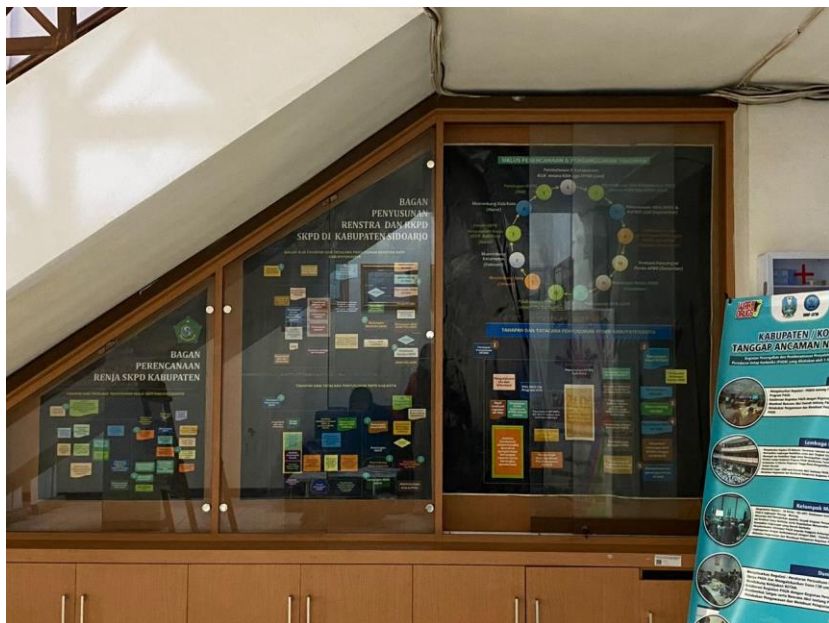
- a. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo**
 - 1. **Lokasi Penelitian**



Halaman Depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Ruang untuk Tunggu Tamu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo



Bagan Rencana Kerja, Rencana Strategis, dan Siklus Rencana Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Front Office Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

2. Wawancara



Wawancara Bersama dengan Bapak Nanang Risdianto, PNS
Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sidoarjo

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

**b. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo**

1. Lokasi Penelitian



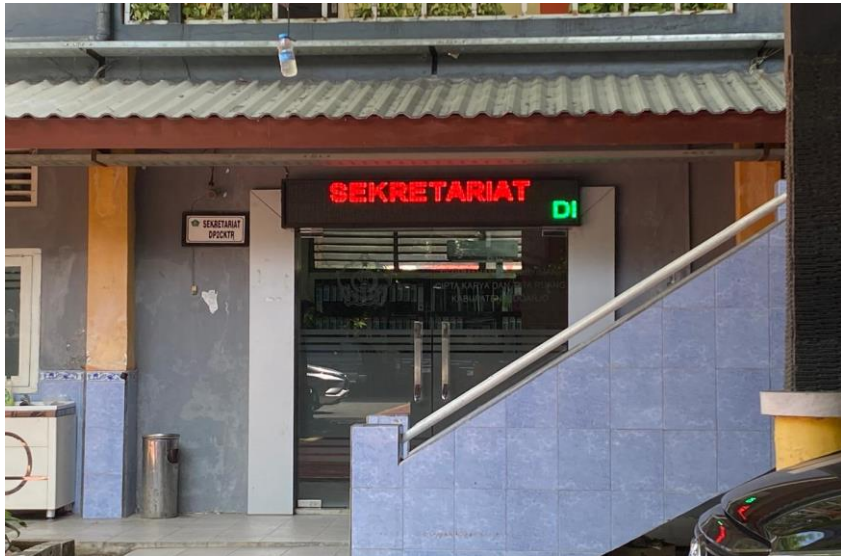
Gerbang Masuk Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Halaman Depan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Front Office, Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya,
dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti





Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

2. Wawancara



Wawancara dengan Ibu Asri, PNS Fungsional Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti

Lampiran 12 Wawancara Dengan Bapak Andrea Rama Wijaya Selaku Sekretaris RW 08



Wawancara dengan Bapak Andrea Rama Wijaya selaku Sekretaris RW 08 Perumahan Tas II Tanggulangin, Desa Kalisampurno Sidoarjo

Lampiran 13 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Lampiran 14 Pembagian Wilayah Kabupaten Sidoarjo Menurut SSWP



Pasal	Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo
	Jabon, Taman, Krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan, Kawasan permukiman tidak pada atau menggunakan lahan sawah yang sudah ada dan atau mengalihfungsikan sawah yang ada.
Sistem Perkotaan, pasal 24 ayat 1	<p>Orde perkotaan, meliputi:</p> <p>Orde K1: Perkotaan di Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo,</p> <p>Orde K2: Perkotaan di Kecamatan Prambon, Kecamatan Krian, Kawasan Pesisir, dan Kecamatan Sedati,</p> <p>Orde K3: Perkotaan Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Wonoayu</p>
Sistem perkotaan, pasal 24 ayat 2	<p>Hirarki atau besaran perkotaan sebagaimana dimaksud meliputi:</p> <p>Perkotaan Sedang meliputi perkotaan yang terdapat di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Krian, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Gedangan.</p> <p>Perkotaan Kecil meliputi perkotaan yang ada di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono.</p>
	Perwilayahan sebagaimana dimaksud adalah 5 (lima) SSWP:



Pasal	Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo
	<p>SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru;</p> <p>SSWP II meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sidoarjo, sebagian Kecamatan Buduran, dan sebagian Kecamatan Candi, dengan fungsi utama Permukiman, Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Sidoarjo;</p> <p>SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung; dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung;</p> <p>SSWP IV meliputi wilayah Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu; dengan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian;</p>



Pasal	Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo
	SSWP V meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Sidoarjo, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi;

Lampiran 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 - 2029**

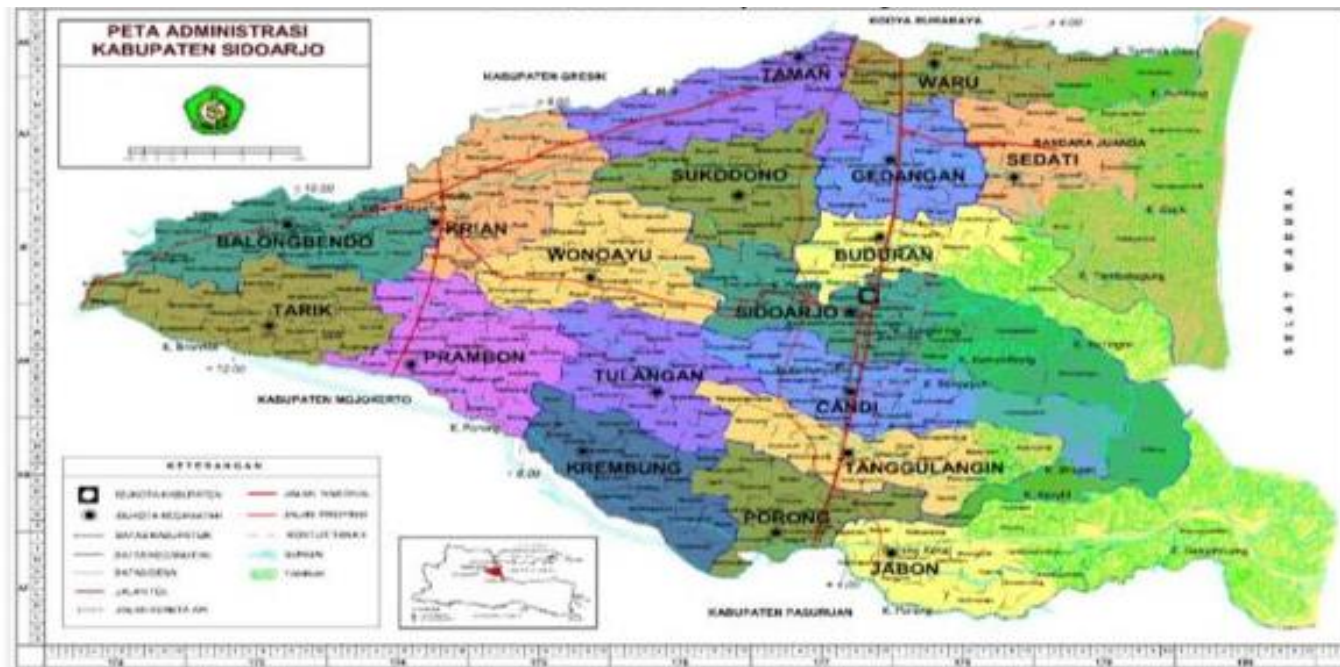
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun RTRW ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha ;
 - c. bahwa adanya dampak luapan lumpur di Porong menimbulkan kerugian, kerusakan lingkungan, berubahnya struktur ruang dan pola penataan ruang wilayah ;
 - d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sesuai Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RTRW ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c, dan d, serta Pasal 26 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 -2029 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Sumber : Perda Kabupaten Sidoarjo No 6 Tagun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029

Lampiran 16 Peta Kabupaten Sidoarjo



Peta Kabupaten Sidoarjo
Sumber: RKPD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Lampiran 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO
TAHUN 2019-2039**

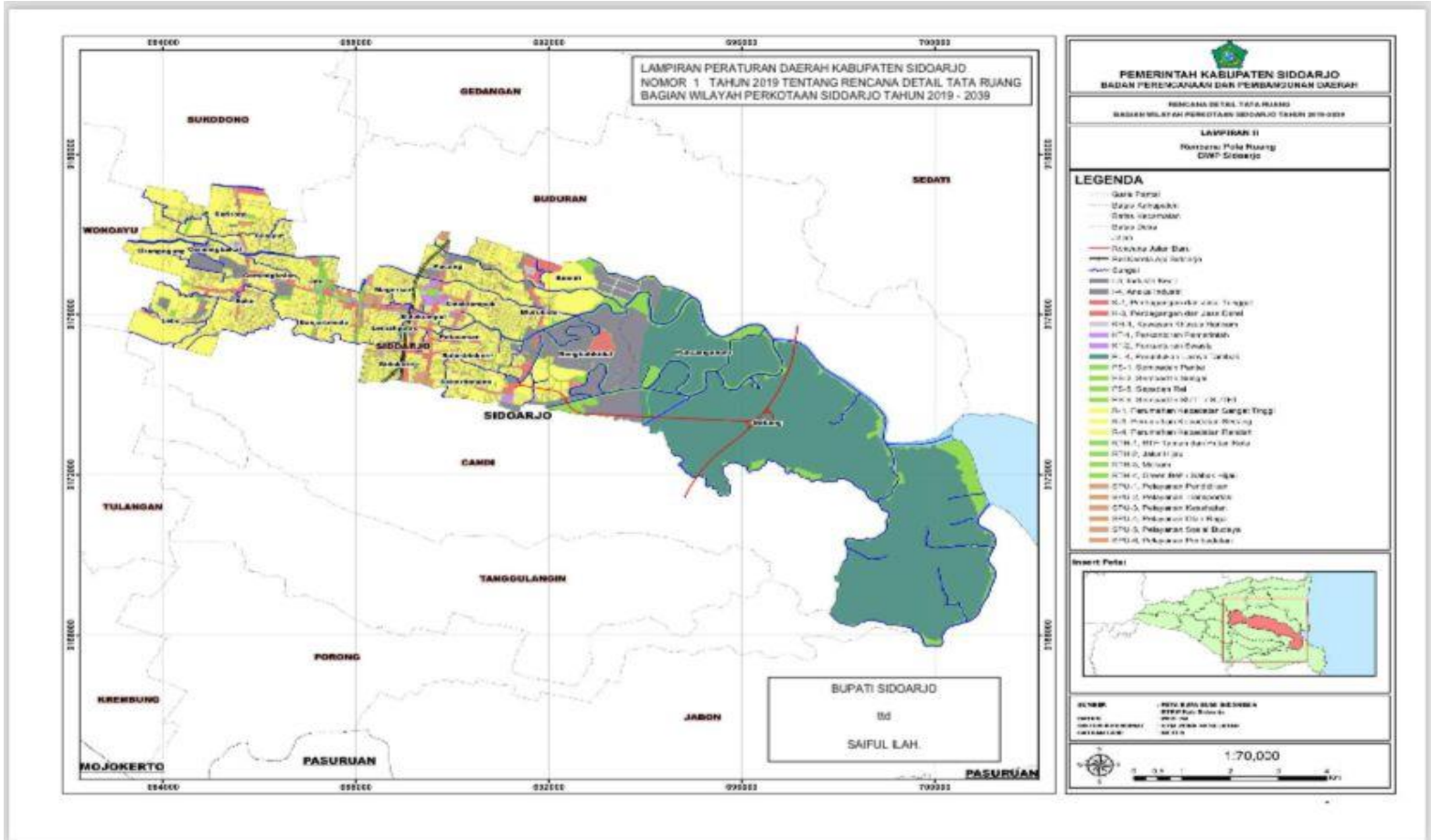
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

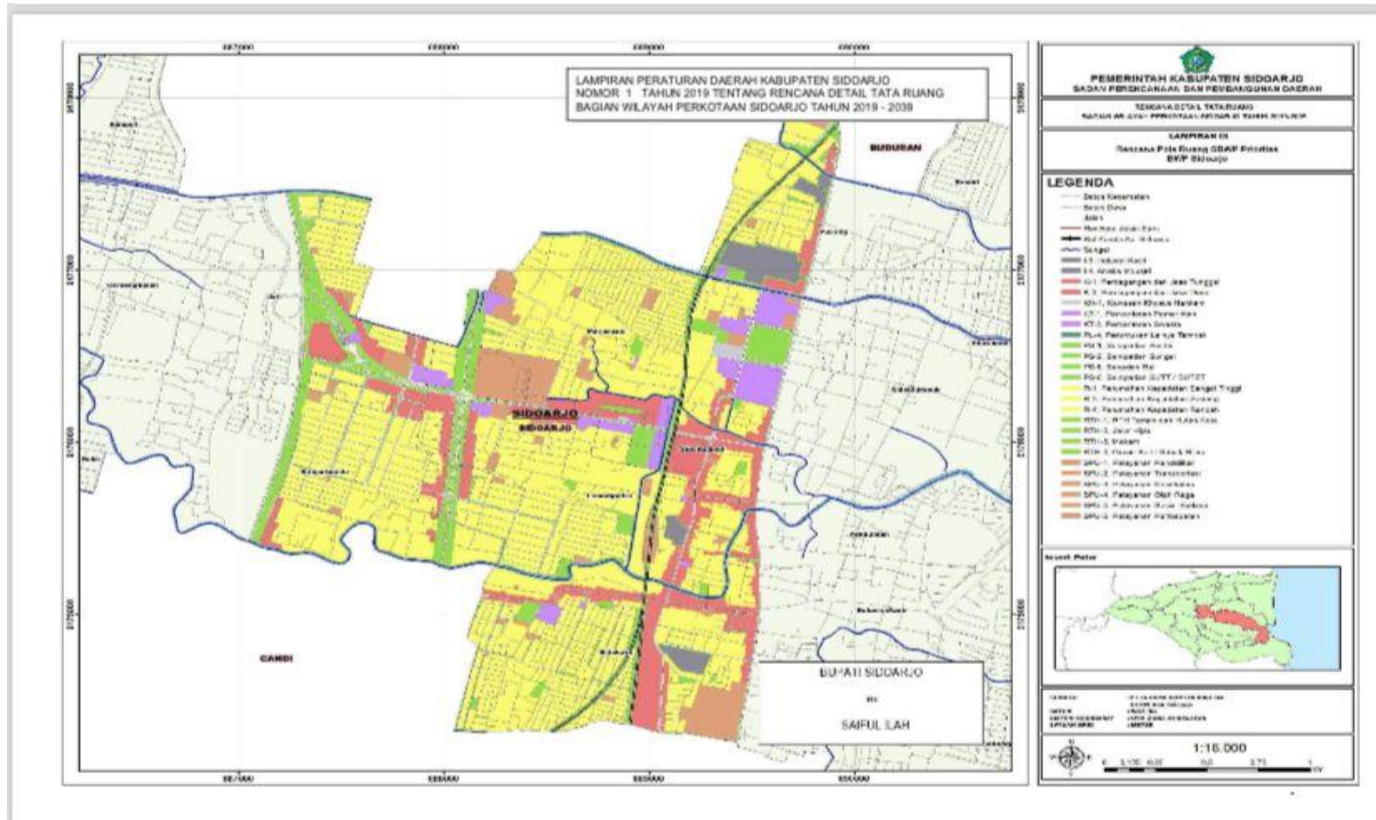
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

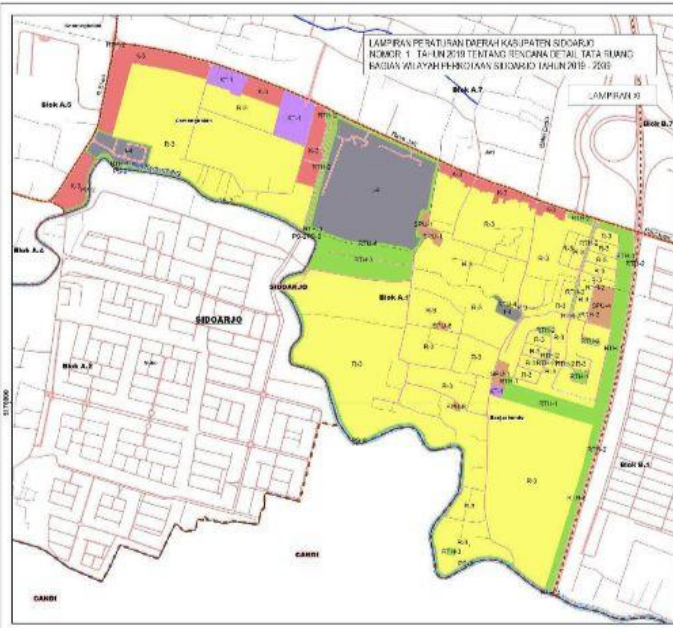
Sumber : Perda Kabupaten Sidoarjo No 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2039

Lampiran 18 Peta Persebaran Wilayah Perkotaan Di Sidoarjo



Lampiran 19 Peta Persebaran Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo





PEMERINTAH KABUPATEN SIDARJO
BALAI PERENCANAAN DAN PENGANGKUTAN DAERAH
 WEDARMA DEWATI, S.E., M.M.
 BAKORWILAYAH PERKOTAAN SIDARJO, 021000 SIDARJO

PETA
Rencana Pola Ruang Blok A-1
 Skala 1:50.000

LEGENDA

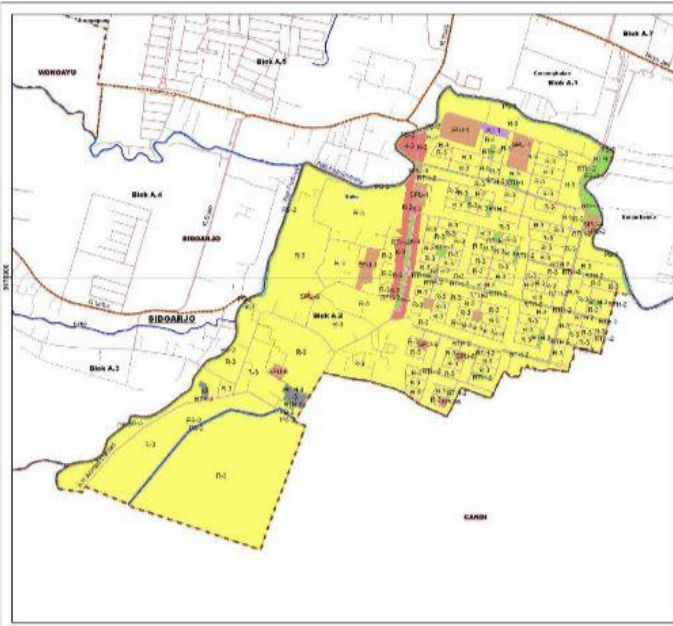
- Sempadan Sungai
- Sempadan Pantai
- Sempadan Jalan
- Sempadan Rel
- Sempadan Kanal
- Sempadan Saluran
- Sempadan Bantaran Sungai
- Sempadan Bantaran Pantai
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran

REKAM PETA

SKALA 1:50.000

UTAMA 1:50.000
UDUKAN 1:100.000
ASAL 1:100.000
PROJEKSI UTM
PROJEKSI UTM
PROJEKSI UTM

1:50.000



PEMERINTAH KABUPATEN SIDARJO
BALAI PERENCANAAN DAN PENGANGKUTAN DAERAH
 WEDARMA DEWATI, S.E., M.M.
 BAKORWILAYAH PERKOTAAN SIDARJO, 021000 SIDARJO

PETA
Rencana Pola Ruang Blok A-2
 Skala 1:50.000

LEGENDA

- Sempadan Sungai
- Sempadan Pantai
- Sempadan Jalan
- Sempadan Rel
- Sempadan Kanal
- Sempadan Saluran
- Sempadan Bantaran Sungai
- Sempadan Bantaran Pantai
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran
- Sempadan Bantaran Saluran

REKAM PETA

SKALA 1:50.000

UTAMA 1:50.000
UDUKAN 1:100.000
ASAL 1:100.000
PROJEKSI UTM
PROJEKSI UTM
PROJEKSI UTM

1:50.000

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata yang tingkat keberhasilannya dapat diukur menggunakan Program utama yaitu :

A. Program Utama (Teknis)

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Permukiman.
4. Program Pengembangan Perumahan.
5. Program Kawasan Permukiman.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
10. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
11. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

B. Program Pendukung (Generik)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat terlihat setelah pengerjaan konstruksi telah dilakukan. Pada umumnya pengerjaan fisik atau konstruksi dilakukan pada Triwulan III. Pada Triwulan I dan II sebelumnya dilakukan persiapan dokumen perencanaan sampai dengan proses pengadaan dan pemilihan pihak ketiga baik lelang maupun penunjukan langsung. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa program antara lain:

Lampiran 20 Analisis Rencana Kerja DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tugas Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diuraikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PD masih menemui beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Belum terjalinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / PD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis bidang perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang;
2. Masih terdapat tumpang-tindih tugas pokok dan fungsi dengan beberapa PD terkait, sehingga sering terjadi ketimpangan data pendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Proporsi pegawai /SDM masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;
4. Belum terbentuknya unsur pengarah BPBD Kabupaten Sidoarjo terkait Pembangunan atau Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
5. Perlu peningkatan koordinasi antara PD dan pihak PDAM dalam menyusun perencanaan kegiatan Perluasan SPAM Wilayah Perkotaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pelatihan-Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah;
7. Perlu peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator dalam bidang Infrastruktur wilayah Kabupaten Sidoarjo

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perubahan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan PD dan Capaian Renstra PD belum dapat disusun, namun demikian dapat kami informasikan capaian kinerja atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2022 hingga dokumen RENJA Perubahan ini disusun. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 229.492.832.351,- terealisasi sebesar Rp. 209.977.082.078 atau sebesar 91,5%. Sampai dengan Tahun 2021 kinerja jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase bangunan yang ber-IMB	%	66	75,98
2	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	%	67	71,13
3	Persentase luas tidak kumuh	%	99,65	99,67
4	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	100	100
5	Persentase akses sanitasi layak	%	96,76	97,29
6	Persentase pelayanan air minum aman	%	35,83	37,76
7	Persentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	82,2	82,2
8	Persentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur	%	100	100

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sampai Dengan Triwulan II

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 184.636.532.021,- sampai dengan Triwulan II (Mei 2023) terealisasi sebesar Rp. 6.116.759.987 atau sebesar 3,31%. Sedangkan untuk capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

Lampiran 21 Lembar Revisi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Evinda Fenny Wulandari
NIM : 1112000069
Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024


Judul Skripsi : *Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Permukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo


Catatan Perbaikan:

- ① Sesuaikan penulisan format dengan buku pedoman
- ② Sesuaikan penomoran tabel, tulisan (huruf TNR 11)
- ③ Halaman ditulis di pojok kanan bawah jika ada judul Bab, ditulis di pojok kanan atas jika tidak ada bab.
- ④ Kesimpulan dibuat 2 paragraf saja (tanpa nomor)
- ⑤ Daftar pustaka rata kanan kiri
- ⑥ Tambah artikel jurnal lengkap di lampiran
- ⑦ Penulisan judul lampiran landscape menghadap ke bawah (ke kanan)

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Anggraeny P, M.AP


Anggraeny P, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 22 Lembar Revisi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Evinda Fenny Wulandari

NIM : 1112000069

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : *Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Permukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

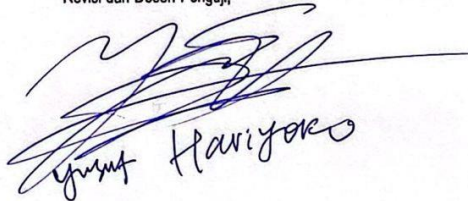
Catatan Perbaikan:

Revisi dalam narasah, Bimbingan
Revisi Bawa narasah skripsinya

Surabaya, 9-7-24
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Gusni Hariyanto

Revisi dari Dosen Penguji,


Gusni Hariyanto

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 23 Lembar Revisi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Evinda Fenny Wulandari

NIM : 1112000069

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

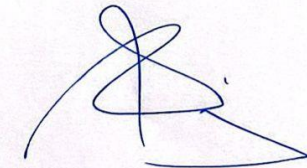
Judul Skripsi : *Interactive Planning dalam Pengembangan Wilayah Permukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo*

Catatan Perbaikan:

Lihat & Skripsi
Waktu konsultasi revisi wajib membawa
skripsi yg. belum dan sudah & revisi

Surabaya, *8 Juli 2024*
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dan Dosen Penguji,



Redskan

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 24 Surat Keterangan Bebas Plagiasi Kampus



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN Nomor: 514/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) by Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom
NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Evinda Fenny Wulandari
NBI : 1112000069

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Mengetahui
Kepala Lab. Otda,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

Lampiran 25 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Skripsi Evinda

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.sidoarjokab.go.id

Internet Source

1%

2

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

3

www.researchgate.net

Internet Source

1%

4

repository.its.ac.id

Internet Source

1%

5

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

1%

6

sidoarjokab.go.id

Internet Source

1%

7

dprd-sidoarjokab.go.id

Internet Source

<1%

8

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

9

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

10

docplayer.info

Internet Source

<1%